BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

1. Karakteristik Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dimana kuesioner yang telah diisi diambil sendiri oleh peneliti ke lembaga atau instansi terkait sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penyebaran dan pengumpulan data kuesioner dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 25 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018. Peneliti telah berhasil menyebar sejumlah 81 kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan oleh responden.

Rincian pengembalian kuesioner:

Tabel 4.1 Karakteristik Data

No.	Kuesioner yang Disebar	Kuesioner yang Kembali
1.	81	81
Tingk	at Pengembalian: (81/81 × 100	%) = 100%

Sumber:data primer, diolah Juli 2018.

2. Karakteristik Responden

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	42	51,9
Perempuan	39	48,1
Total	81	100

Sumber:data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui profil pegawai pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden menunjukan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,9% dan responden berdasarkan jenis kelamin perempuan sebesar 48,1%. Maka berdasarkan presentase diatas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan.

b. Profil Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.3 Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidkan	Frekuensi	Presentase (%)
Ekonomi/Akuntansi	30	37,0
Hukum	10	12,3
Teknik	10	12,3
Sosial	15	18,5
Lainnya	16	19,8
Total	81	100

Sumber; data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan latar belakang pendidikan pegawai pada pemerintah Kabupaten Tebo. Data tersebut diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi sebesar 30 atau 37,0% dan hukum sebesar 10 atau 12,3%. Responden dengan latar belakang pendidikan teknik sebesar 10 atau 12,3% dan sosial sebesar 15 atau 18,5%. Sedangkan sebanyak 16 atau 19,8% merupakan responden dengan latar belakang pendidikan selain yang disebutkan diatas.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase (%)
D3	26	32,1
S1	45	55,6
S2	10	12,3
Total	81	100

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Dari tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa mayoritas responden berpendidikan S1, yaitu sebanyak 45 orang atau 55,6%, responden yang berpendidikan D3 sebanyak 26 orang atau 32,1% dan responden yang berpendidikan S2 ada 10 orang atau 12,3%.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan pegawai pemerintah Kabupaten Tebo cukup tinggi. Pada saat ini juga pemerintah Kabupaten Tebo telah meningkatkan kualitas pendidikan pagawainya dengan melakukan perekrutan pegawai dengan latar belakang sarjana. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk manambah jumlah pegawai yang memiliki pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas kinerjanya.

d. Profil Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.5 Jabatan Responden

Jabatan	Frekuensi	Presentase (%)
Kepala Badan/Dinas/Instansi	27	33,3
Sekretaris/Kabid/Kabag	25	30,9
Kasubid/Kasubbag/Lasibdis/Kasie	29	35,8
Total	81	100

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Menurut tabel diatas bahwa responden dengan jabatan sebagai kepala dinas/badan/instansi berjumlah 27 atau 33,3%. Responden dengan jabatan sektretaris/kabid/kabag berjumlah 25 atau 30,9%. Selanjutnya responden dengan jabatan kasubid/kasubbag/lasibdis/kasie berjumlah 29 atau 35,8%.

e. Profil Responden Bersasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.6 Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Frekuensi	Presentase (%)
1-5 Tahun	20	24,7
6-10 Tahun	27	33,3
11-15 Tahun	24	29,6
16-20 Tahun	10	12,3
Total	81	100

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja antara 1-5 tahun sebanyak 20 orang atau 24,7%, responden yang bekerja antara 6-10 tahun sebanyak 27 Orang atau 33,3%, responden yang bekerja antara 6-10 tahun sebanyak 24 orang atau 29,6 dan responden yang bekerja antara 16-20 tahun sebanyak 10 orang atau 12,3%. Data tersebut menunjukan bahwa mayoritas pegawai bekerja 6-10 tahun.

B. Uji Kualitas Instrumen Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis stastitk deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai mean, median, minimum, maximum, da standar deviasi dari masing-masing variable dalam penelitian yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dan kinerja pemerintah daerah. Hasil statistik deskriptif dari tabel diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif **Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	81	12	30	23.49	4.267
Transparansi	81	9	20	14.93	2.682
Anggaran Berbasis Kinerja Kinerja Pemerintah	81	14	30	23.00	3.493
Daerah	81	24	50	38.90	5.200
Valid N (listwise)	81				

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukan perhitungan hasil uji statistik deskriptif mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 81 jawaban responden. Nilai variabel akuntabilitas yang telah di olah memiliki skor minimum 12 dan skor maksimum 30. Nilai standar deviasi sebesar 4,267 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 23,49 dimana nilai tersebut lebih besar dari dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang luas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tebo. Pada variabel trasnparansi dimana variabel memiliki nilai skor minimum 9 dan skor maksimumnya 20. Nilai standar deviasi sebesar 2,682 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 14,93 dimana nilai tersebut lebih besar dibandinglan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap transparansi baik secara praktis dan teoritis.

Kemudian untuk variabel anggaran berbasis kinerja dimana variable ini memiliki jumlah minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai standar deviasi sebesar 3.493 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 23,00 diamana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang tinggi tentang anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Kabupaten Tebo. Terakhir yakni variabel kinerja pemerintah daerah dimana varabel ini memiliki skor minimum sebesar 24 dan skor minimum sebesar 50. Nilai satndar deviasi sebesar 5,200 dan nilai rata-rata

yang diperoleh sebesar 38,90 dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemehaman yang baik tentang kinerja pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Uji Kualitas Data

a. Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang perlu untuk diukur. Jika validitasnya tinggi maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya, sehingga data yang digunakan merupakan data yang memadai. Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS berdasarkan nilai KMO. Validitas terpenuhi apabila nilai KMO>0,5 (Nazaruddin dan Basuki,2017).

Berdasarkan tabel 4.7 menyajikan hasil pengujian validitas untuk semua variabel penelitian. Penyajian dari tabel tersebut menunjukan bahwa nilai utnuk variabel akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan nilai lebih dari 0,5 sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Component Matrix	Keterangan
		AK.1	0,888	Valid
Akuntabilitas		AK.2	0,864	Valid
Pengelolaan	0,883	AK.3	0,870	Valid
Keuangan	0,883	AK.4	0,890	Valid
Daerah		AK.5	0,901	Valid
		AK.6	0,867	Valid
Transparansi		TP.1	0,854	Valid
Pengelolaan	0.920	TP.2	0,892	Valid
Keuangan	0,839	TP.3	0,881	Valid
Daerah		TP.4	0,874	Valid
	is 0,890	ABK.1	0,867	Valid
		ABK.2	0,863	Valid
Anggaran Berbasis		ABK.3	0,828	Valid
Kinerja		ABK.4	0,797	Valid
3		ABK.5	0,830	Valid
		ABK.6	0,855	Valid
		KINERJA.1	0,822	Valid
		KINERJA.2	0,804	Valid
		KINERJA.3	0,783	Valid
		KINERJA.4	0,760	Valid
Kinerja Pemerintah	0,879	KINERJA.5	0,714	Valid
Daerah	0,079	KINERJA.6	0,804	Valid
		KINERJA.7	0,772	Valid
		KINERJA.8	0,813	Valid
		KINERJA.9	0,766	Valid
		KINERJA.10	0,761	Valid

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban responden yag diterima. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS yang dilihat dari

nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari satu atau sama dengan 0,70 maka reliabilitas terpenuhi (Nazaruddin dan Basuki,2017).

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas	6	0,941	0,70	Reliabel
Tranparansi	4	0,897	0,70	Reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja	6	0,915	0,70	Reliabel
Kinerja	10	0,929	0,70	Reliabel

Sumber: data primer, diolah Januari 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's* alpha untuk masing-masing variabel penelitian lebih dari standar nilai reliabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,70 dengan demikian variabel Akuntabilitas, Tranparansi, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Kinerja Pemerintah Daerah dapat dinyatakan reliable.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Pada pengujian normalitas ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, dimana uji ini dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05 (Nazaruddin dan Agus, 2015). Hasil pengujian dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
Normal Parameters	Std. Deviation	3.40300944
	Absolute	.098
Most Extreme Differences	Positive	.098
	Negative	073
Kolmogorov-Smirnov Z		.886
Asymp. Sig. (2-tailed)		.413

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber:data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan hasil uji dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,886 dengan nilai signifikan 0,413 lebih besar dari *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,01, maka variabel tersebut memiliki multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikuti:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model			dardized icients	Standardized Coefficients	Т	Sig.	Colline Statist	- 1
		В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	10.635	3.21		3.313	0.001		
	Akuntabilitas	0.399	0.14	0.328	2.857	0.005	0.423	2.364
1	Transparansi	0.211	0.148	0.109	1.425	0.158	0.95	1.052
	Anggaran Berbasis Kinerja	0.684	0.173	0.459	3.962	0	0.414	2.418

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 2,364 dan nilai *tolerance* sebesar 0,423, nilai VIF untuk variabel tranparansi adalah 1,052 dan nilai *tolerance* sebesar 0,95, nilai VIF untuk variabel anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 2,418 dan nilai *tolerance* sebesar 0,414. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut bebas dari asumsi multikolinieritas karena masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,01.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan dalam model regresi. Uji *glesjer* digunakan untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas maka nilai signifikansi harus lebih dari 0,05 agar tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstand Coeffi		Standardi zed Coefficient s	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	5.107	2.11		2.42	0.018
	Akuntabilitas	-0.017	0.092	-0.032	-0.185	0.854
1	Transparansi	-0.033	0.098	-0.04	-0.342	0.733
	Anggaran Berbasis Kinerja	-0.073	0.114	-0.113	-0.645	0.521

a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk masing-masing variabel lebih dari nilai *alhpha* 0,05, maka model dari regresi tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

D. Uji Regresi Linier dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda, teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi keterkaitan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	4	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	10.635	3.21		3.313	0.001
	Akuntabilitas	0.399	0.14	0.328	2.857	0.005
1	Transparansi	0.211	0.148	0.109	1.425	0.158
	Anggaran Berbasis Kinerja	0.684	0.173	0.459	3.962	0

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tebel 4.13 diatas dapat diketahui hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,399, untuk variabel transparansi sebesar 0,211 dan untuk variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 0,684, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Kinerja =
$$10,635 + 0,399AK + 0,211TR + 0,864ABK + e$$

1. Pengujian Hipotesis 1 (H₁)

Hubungan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tabel hasil regresi didapatkan nilai koefisien beta (β) 0,399 dan nilai sig 0,005 < *alpha* 0,05 yang berarti bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Dengan demikian pengujian hipotesis H_1 menyatakan bahwa variabel akuntabilitas

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

Hubungan anatara transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai koefisien beta (β) 0,211 dengan nilai sig 0,158 > alpha 0,05 yang berarti transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Dengan demikian hipotesis H_2 menyatakan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo ditolak.

3. Pengujian Hipotesis 3 (H₃)

Hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai koefisien beta (β) 0,648 dengan nilai sig 0,000 < *alpha* 0,05 yang berarti anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 3 (H_3) yang menyatakan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemeritah daerah Kabupaten Tebo **diterima.**

E. Uji Nilai T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (sendiri-sendiri atau masing-masing variabel) berpengaruh terhadap

variabel dependennya. Dengan asumsi bahwa jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	4	Cia
		В	Std. Error	Beta	·	Sig.
	(Constant)	10.635	3.21		3.313	0.001
	Akuntabilitas	0.399	0.14	0.328	2.857	0.005
1	Transparansi	0.211	0.148	0.109	1.425	0.158
	Anggaran Berbasis Kinerja	0.684	0.173	0.459	3.962	0

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tabel 4.14 nilai sig variabel akuntabilitas sebesar 0,005 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 maka akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel transparansi menunjukkan nilai sig sebesar 0,158 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel anggaran berbasis kinerja menunjukkan nilai sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 maka anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhapdap kinerja pemerintah daerah.

F. Uji Nilai F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara serentak (bersama-sama). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	1236.77	3	412.257	34.264	.000 ^b
1	Residual	926.438	77	12.032		
	Total	2163.21	80			

- a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja,

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Uji F-statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel independen yaitu pengaruh akuntabilitas,transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

G. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted Square R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen menerangkan variabel dependennya. Uji ini

dilakukan dengan melihat nilai *Adjusted R Square* pada masing-masing variabel independennya dengan menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen menjelaskan variabel dependennya (Nazaruddin dan Agus, 2015). Hasil uji koefisien determinasi dijelaskan dalam tabel 4.16 berikut:

 $Tabel \ 4.16$ Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of	
			Square	the Estimate	
1	.756ª	.572	.555	3.469	

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,555 yang artinya variabel kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 55,5% sedangkan sisanya 44,5% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

H. Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Akuntabilitas, Transparansi, Anggaran Berbasis Kinerja terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah. Pengaruh dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien beta (β) 0,399 dan nilai sig 0,005 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akutabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dalam OPD Kabupaten Tebo, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang lakukan oleh Nadirsyah (2016), Riswanto (2016), Auditya (2013), dan Garini (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemerinah guna terwujudnya good governance yang lebih baik.

2. Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Hamid, 2007). Hal tersebut akan sangat sulit diterapkan apabila pemerintah tidak melakukan penanganan terhadap kinerjanya dengan baik.

Transparansi juga harus berjalan seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan suatu lembaga ataupun informasi yang dapat mempengaruhi hak-hak privasi dari individu. Namun pada penelitian ini tidak berhasil membuktikan pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini hanya melihat dari lembaga publik yang diteliti. Berkaitan dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Pada beberapa lembaga publik yang diteliti menyatakan bahwa tidak semua informasi dari lembaga yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien beta (β) 0,211 dengan nilai sig 0,158 > 0,05 yang berarti transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrida (2012) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya (2013),Nadirsyah (2016), dan Riswanto (2016).

3. Pengujian Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini didapatkan nilai koefisien beta (β) 0,648 dengan nilai sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh postif terhadap

kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin baik penyerapan anggran berbasis kinerja maka kinerja pemerintah daerah semakin baik pula.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yuliani (2014), Adiwirya (2015), dan Febrina (2016). Penerapan anggaran berbasis kinerja agar memiliki propgram yang menjadi prioritas dan menjabarkannya dalam kegiatan dengan pencapaian hasil yang jelas. Pemerintah juga dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran agar dapat meningkatkan hasil dari pencapaian organisasi.